



**Judul** : Efektivitas dana desa perlu ditingkatkan  
**Tanggal** : Kamis, 19 Juli 2018  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 4

## Efektivitas Dana Desa Perlu Ditingkatkan

JAKARTA — Program Dana Desa perlu dioptimalkan untuk mengefektifkan pengurangan tingkat kemiskinan. Jumlah alokasi dana desa, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, diharapkan lebih besar guna mempercepat pengurangan kemiskinan.

Hal itu perlu dilakukan mengingat peran pemerintah kabupaten/kota yang terbatas. "Alokasi dana desa bagi desa-desa pesisir perlu diprioritaskan untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir di pedesaan," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu (18/7).

Sebelumnya, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo juga menyatakan bahwa daerah harus bisa memaksimalkan penggunaan dana desa agar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Dia mengatakan, ada beberapa contoh daerah yang sudah mampu memaksimalkan penggunaan dana desa dan mampu menghidupkan BUMDes seperti Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, dan di Malang. "Bahkan BUMDes Desa Ponggok sudah mampu menghasilkan pendapatan desa hingga Rp 4,2 miliar per tahun," kata Sartono.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, kedua daerah tersebut mencontohkan bahwa mereka mampu memaksimalkan program Dana Desa sehingga bisa menghasilkan nilai tambah keuntungan yang luar biasa bagi kemajuan desanya. Ia berharap, daerah lain juga bisa mencontoh keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memaparkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 tercatat 9,82 persen dari total populasi atau 25,95 juta orang.

Persentase kemiskinan 9,82 persen tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mengalami penurunan sebanyak 1,82 juta orang dibandingkan periode Maret 2017.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, keluarga yang masuk kategori rentan miskin harus dijaga dengan pemberdayaan ekonomi agar tidak kembali jatuh miskin.

"Orang sudah keluar dari kemiskinan, tapi keluar dari kemiskinan *kan* ada garis *nih*. Ada yang keluarnya cuma naik di atasnya sedikit, ada yang sudah jauh. Kalau sudah jauh itu relatif aman, tapi yang dekat-dekat ini yang kita sebut sebagai rentan miskin," ujar dia.

Bambang menuturkan, penduduk rentan miskin adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Pemerintah fokus agar penduduk rentan miskin ini tidak kembali berada di bawah garis kemiskinan.

"Solusinya, yaitu berbagai bantuan ini diberikan sampai 40 persen tadi. Untuk keluarga seperti ini maka yang paling penting pemberdayaan ekonomi," kata Bambang.

Untuk kemudahan berusaha, Bambang menekankan pentingnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM ini harus didukung dengan akses pasar, kredit mikro, dan kemitraan. Intinya, kata dia, semua program pemberdayaan ekonomi harus diokuskan agar yang rentan miskin tidak kembali miskin.